



## Perilaku Koruptif Dalam Ranah Organisasi: Budaya Manipulatif Organisasi Mahasiswa Intra Kampus

Hilma Amelia<sup>1</sup>, Nanda Wisnu Syahputra<sup>2</sup>, Novelia Rachmanda Putri<sup>3</sup>,  
Muhammad Agus Hardiansyah<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Sosiologi, Universitas  
Sultan Ageng Tirtayasa

---

### Abstract

Received: 06 Juni 2024  
Revised: 12 Juni 2024  
Accepted: 29 Juni 2024

*When talking about corruption, it turns out that in a specific environment, especially in universities, many manipulative practices are still found among students within organizations. This manipulative behavior has become a culture within the intra-campus organizational institution that can lead to widespread corrupt behavior if done solely for personal interests rather than for the greater good. The method used in this article employs a literature review, a method conducted by collecting data by comprehensively understanding a specific topic by detailing literature related to the article's discussion topic. In examining how manipulative culture can be reproduced within the scope of the organization, we can envision it within the framework proposed by Anthony Giddens as the process of individuals interacting with social structures. Efforts to combat corruption and promote ethical culture and integrity among students pose a serious challenge in the university environment.*

**Keywords:** Corruption, Students, Manipulative

(\*) Corresponding Author: [2290210058@untirta.ac.id](mailto:2290210058@untirta.ac.id), [2290210052@untirta.ac.id](mailto:2290210052@untirta.ac.id),  
[2290210043@untirta.ac.id](mailto:2290210043@untirta.ac.id), [Muhagushardi@untirta.ac.id](mailto:Muhagushardi@untirta.ac.id)

**How to Cite:** Amelia, H., Syahputra, N., Putri, N., & Hardiansyah, M. (2024). Perilaku Koruptif Dalam Ranah Organisasi: Budaya Manipulatif Organisasi Mahasiswa Intra Kampus. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 227-235. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12593442>

---

## INTRODUCTION

Korupsi merupakan suatu permasalahan sosial yang tetap menarik untuk dijadikan sebagai bahan dalam berdiskusi. Hal ini bukan hanya karena korupsi merupakan fenomena umum yang sering terjadi dalam lembaga organisasi, tetapi korupsi memiliki dampak pada berbagai aspek kehidupan yang tentunya menimbulkan efek domino yang meluas serta berdampak terhadap pembangunan perekonomian negara. Sejak era reformasi, pemerintah telah membuat berbagai program sebagai upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia. Namun dalam realitanya menunjukkan bahwa perilaku-perilaku koruptif masih bermunculan di berbagai tingkat baik pusat maupun daerah.

Hal ini membuktikan bahwa segala usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah masih belum membuahkan hasil yang optimal. Yang menjadi pusat perhatian adalah beberapa orang yang terlibat dalam perilaku koruptif adalah mereka yang mempunyai posisi dan jabatan tinggi. Seringkali kita mendengar cerita bahwa salah satu tujuan untuk masuk ke dalam struktur kekuasaan adalah berjuang melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Namun pada kenyataannya menunjukkan bahwa ketika sudah masuk ke dalam struktur kekuasaan, mereka akan jatuh dalam pusaran arus korupsi. Mengapa fenomena seperti ini bisa terjadi?

Organisasi adalah sebuah unit sosial yang dikoordinasikan secara sadar, terdiri atas dua orang maupun lebih, serta relatif terus-menerus guna untuk mencapai serangkaian tujuan bersama. Organisasi merupakan wadah seseorang untuk berproses dan melakukan berbagai kegiatan (program kerja) yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu demi menggapai cita-cita dari suatu organisasi tersebut. Organisasi biasanya memiliki landasan ideologis tertentu guna menentukan arah berjalannya organisasi berlangsung, garis besar haluan organisasi menjadi indikator dalam organisasi agar dapat melihat kebutuhan serta kekurangan dalam organisasi. Organisasi selalu melibatkan banyaknya kepentingan masyarakat atau kebermanfaatan organisasi bagi orang-orang yang berada di sekitarnya (Robbin dan Judge, 2008:5).

Dalam dunia pendidikan terkhusus dalam ruang lingkup perkuliahan, ada banyak organisasi-organisasi yang terbentuk di universitas untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa pada ranah akademik maupun non-akademik, organisasi selalu berusaha untuk mewadahi hal itu agar mahasiswa tidak mengalami hambatan dalam perkuliahannya. Organisasi dalam lingkup mahasiswa terbagi menjadi dua; Pertama, organisasi intra kampus adalah organisasi yang dinaungi serta mentaati aturan secara langsung dari pihak universitas secara finansial maupun sarana dan prasarana dalam menjalankan roda organisasinya. Kedua, organisasi ekstra kampus adalah organisasi yang berada diluar kampus dimana dalam menjalankan roda organisasi sama sekali tidak bergantung kepada universitas secara finansial maupun secara sarana dan prasarana, organisasi ekstra kampus biasanya dikelola hanya oleh orang-orang yang ada di dalamnya.

Lembaga organisasi intra kampus, mahasiswa melaksanakan berbagai kegiatan program kerja dari sebuah ormawa serta untuk mengembangkan *soft skill* dalam berorganisasi. Semua kegiatan tersebut tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan secara finansial. Dalam hal ini, salah satu pihak yang memiliki peran penting yaitu dekanat/fakultas sebagai pihak yang mendukung penyelenggaraan kegiatan organisasi mahasiswa dengan menyediakan dana pengembangan pendidikan untuk dimanfaatkan dalam melaksanakan program kerja dari masing-masing organisasi. Namun dalam pelaksanaannya ada permasalahan dalam proses pencairan dana untuk organisasi mahasiswa intra kampus yang berasal dari pihak universitas, dimana terdapat sistem absolut yang wajib ditaati oleh lembaga organisasi intra kampus ini dan berimplikasi kepada perilaku manipulatif dari masing-masing lembaga organisasi mahasiswa intra kampus demi berjalannya roda organisasi. Perilaku manipulatif ini sudah menjadi budaya dalam lembaga organisasi intra kampus yang dapat menyebabkan perilaku koruptif secara besar-besaran jika hanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan banyak orang. Ketika seseorang masuk kedalam organisasi tindakan manipulatif adalah tindakan yang “wajib” dilakukan demi berlangsungnya organisasi, tanpa kita sadari sistem yang buruk mengajarkan kita untuk bertindak demikian.

Dalam proses pencairan dana kegiatan mahasiswa tentunya membutuhkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana kepada pihak dekanat/fakultas. Hal ini cukup menjadi perhatian bagi kami untuk membahas adanya permasalahan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam LPJ dengan

melakukan berbagai cara untuk mendapatkan dukungan dari pihak dekanat/fakultas maupun universitas secara finansial.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam artikel ini menggunakan studi kepustakaan yaitu metode yang dilakukan dengan pengumpulan data dengan cara memahami suatu topik tertentu secara menyeluruh dengan merinci literatur-literatur yang berhubungan dengan topik pembahasan artikel. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari sumber dan mengkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan. Bahan pustaka yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasan artikel.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Landasan Teoritis**

Teori strukturasi dimulai dengan kritik yang diajukan oleh Giddens terhadap pendekatan strukturalisme, post-strukturalisme, dan fungsionalisme dalam memahami struktur. Salah satu contohnya adalah kritik terhadap karya Claude Levi Strauss, seorang tokoh strukturalis, yang secara signifikan mempengaruhi pendekatan analisis ilmu sosial. Giddens menilai bahwa kritiknya terhadap perspektif strukturalis merupakan penolakan yang kontroversial terhadap subjek. Sebagai contoh dalam melihat suatu gejala sosial dalam masyarakat kapitalis, perhatian strukturalis tidak terfokus pada perilaku para pemodal atau konsumen, tetapi justru pada logika-internal kinerja modal; dengan kata lain, strukturalisme adalah bentuk dualisme (Giddens, 2008: 335).

Dualisme ini juga ditemukan pada perspektif post-strukturalis (Giddens, 1987: 348). Pemikiran penting dari aliran post-strukturalis, contohnya dalam karya Jacques Derrida, mengamati bahwa perbedaan tidak hanya menunjukkan sesuatu, tetapi juga membentuk identitas yang bahkan merupakan hakikat dari hal tersebut. Hal ini berbeda dengan dualisme yang ditemukan dalam fungsionalisme Talcott Parsons. Fungsionalisme sendiri adalah pendekatan yang menyetujui bahwa sistem sosial memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Giddens, sebaliknya, berpendapat bahwa sistem sosial tidak memiliki kebutuhan, melainkan kebutuhan ada pada para pelaku. Pendekatan fungsionalisme dianggap oleh Giddens sebagai suatu bentuk penolakan terhadap kenyataan bahwa manusia sebagai pelaku memiliki kecerdasan dan bukanlah semata-mata individu yang bodoh atau robot yang hanya bertindak berdasarkan naskah yang telah ditentukan sebelumnya. Fungsionalisme juga dianggap olehnya sebagai penafian terhadap dimensi ruang dan waktu dalam menjelaskan fenomena sosial, yang menyebabkan konflik antara unsur statis dan dinamis, serta antara stabilitas dan perubahan.

Tujuan dari teori strukturasi adalah untuk memfasilitasi pemahaman terhadap dunia yang terorganisir dengan menekankan konsep agensi manusia. Pendekatannya melibatkan pengakuan terhadap perbedaan antara konsep *struktur* dan *sistem*. Meskipun sistem sosial tidak memiliki struktur secara eksplisit, namun menunjukkan *sifat-sifat struktural*. Sifat-sifat struktural ini hanya ditemukan dalam berbagai tindakan instant dan menjadi pijakan memori yang memberi petunjuk pada agen-agen manusia yang telah banyak memiliki pengetahuan

(Giddens, 1984: 25). Sifat-sifat struktural yang timbul dalam sebuah totalitas reproduksi sosial, yang disebut oleh Giddens sebagai prinsip-prinsip struktural (structural principles). Praktik-praktik sosial yang memiliki perluasan ruang dan waktu terbesar dalam totalitas disebut sebagai institusi (*institution*) (Giddens, 1984: 16-17).

Strukturasi merupakan kondisi yang menjelaskan bagaimana sebuah tatanan relasi-relasi sosial dapat terstruktur dalam hubungan dualitas (timbang balik) antara sang pelaku dengan struktur (Ross dalam Beilharz, 2002: 22-23). Dualitas struktur dalam reproduksi sosial dapat dicapai dengan pemahaman terhadap tiga tingkatan kesadaran atau tiga dimensi internal dalam diri manusia, yakni kesadaran praktis, kesadaran diskursif, dan kognisi/motivasi tak sadar. Giddens menawarkan konsep-konsep ini sebagai pengganti dari triad psikoanalitis Sigmund Freud yakni ego, super-ego, dan id (Giddens, 1984: 7).

Motivasi tak sadar merujuk pada dorongan atau kebutuhan manusia yang dapat mempengaruhi perilaku, meskipun tidak selalu disadari secara langsung dalam tindakan itu sendiri. Kesadaran diskursif menggambarkan pemahaman tentang tindakan manusia yang dapat dipertimbangkan, direfleksikan, dan dijelaskan secara terperinci dan eksplisit. Sedangkan, kesadaran praktis adalah pemahaman terhadap tindakan manusia yang tidak selalu dapat diurai atau dapat dipertanyakan ulang dengan mudah. Fenomenologi memandang wilayah ini masuk dalam gugus pengetahuan yang sudah diandaikan (*taken for granted knowledge*) serta merupakan sumber rasa aman ontologis (*Ontological security*).

Kesadaran praktis menjadi kunci dalam pemahaman bagaimana berbagai tindakan dan praktik sosial dalam masyarakat secara perlahan bertransformasi menjadi struktur, serta bagaimana struktur tersebut membatasi dan memberdayakan tindakan serta praktik sosial masyarakat. Giddens menyebut bahwa tindakan dan praktik sosial ini dapat dianggap sebagai 'realitas yang sudah diinterpretasikan' (Giddens, 1976: 166). Reproduksi sosial terjadi melalui pengulangan praktik sosial yang jarang dipertanyakan lagi. Oleh sebab itu bagaimana reproduksi tindakan manipulatif dalam organisasi intra kampus dapat terjadi.

### **Tindakan Korupsi di Lingkungan Kampus**

Tindakan korupsi dalam ranah perguruan tinggi saat ini sudah bukan menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan, terbukti dengan banyaknya perguruan tinggi atau yang memiliki latar belakang perguruan tinggi yang pernah terlibat kasus korupsi (*dalam konteks UU Tipikor*). Badan penyelenggara pendidikan memiliki peran “mendidik” sehingga peserta didik tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Badan penyelenggara pendidikan tinggi dibedakan sesuai dengan kondisi yang berjalan di Indonesia, dimana Perguruan Tinggi Negeri (PTN) adalah penyelenggara pendidikan yang berada di bawah pengawasan negara karena diselenggarakan melalui Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KEMENDIKBUDRISTEKDIKTI), sedangkan untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) adalah penyelenggara pendidikan yang berada dibawah pengawasan negara melalui Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) dari Kemenristekdikti namun dilaksanakan oleh badan hukum swasta (yayasan) yang dibentuk dari peran dan masyarakat untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dari pembagian perguruan tinggi tersebut, tindakan korupsi dapat terjadi dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kesempatan yang ada. Tindakan korupsi di lingkungan PTN muncul tidak hanya terjadi antara dosen dan mahasiswa, tetapi juga terjadi pada level birokrasinya, seperti korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga tindakan korupsi dalam lingkungan PTN dikatakan cenderung kepada pelanggaran hukum dalam konteks Pasal 2 UU Tipikor. Berbeda dengan tindakan korupsi yang lahir di lingkungan PTS lebih kompleks karena tindakan tersebut terjadi disebabkan adanya transaksi antara dosen dan mahasiswa yang dilatarbelakangi *simbiosis mutualisme* atau tindakan yang saling menguntungkan, sehingga menimbulkan perbuatan yang belum terdefiniskan secara normatif dalam hukum Indonesia namun dapat dikatakan sebagai pelanggaran moral.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam pembahasan ini akan fokus pada bagaimana perilaku koruptif dapat terjadi dalam ranah organisasi di kampus sehingga menimbulkan budaya manipulatif yang dilakukan oleh mahasiswa intra kampus.

### **Reproduksi Budaya Manipulatif dalam Organisasi**

George Ritzer memperkenalkan Teori Sistem dalam kerangka fakta sosial, yang secara khusus diterapkan pada permasalahan sosial terkait dengan nilai-nilai, serta institusi atau pranata sosial yang mengatur dan mengorganisir kehidupan bersosial. Sistem diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari elemen-elemen fungsi yang beragam, saling berhubungan, dan membentuk pola yang kompleks. Interaksi antara elemen-elemen sosial ini adalah relasi timbal-balik atau hubungan dua arah.

Anthony Giddens mengenalkan konsep strukturasi sebagai upaya untuk mengatasi pemisahan antara pandangan strukturalis dan agensial dalam sosiologi. Konsep ini menyoroti duality of structure, dimana struktur sosial dan tindakan individu saling terkait dan saling membentuk. Giddens menekankan bahwa struktur tidak hanya membatasi, tetapi juga menciptakan peluang bagi individu, sementara agensi individu dapat memengaruhi dan bahkan mengubah struktur. Dengan merinci sembilan kategori interaksi dan menekankan reflektivitas, Giddens menyoroti kompleksitas hubungan antara tindakan individu dan lingkungan sosial, menegaskan bahwa kehidupan sosial tidak hanya dipengaruhi oleh aturan dan norma, tetapi juga oleh keputusan dan tindakan aktif individu.

Anthony Giddens mengaktualisasikan sembilan kategori interaksi untuk menguraikan bagaimana individu berinteraksi dengan struktur sosial dalam kerangka konsep strukturasi;

- (1) Membahas bagaimana individu memahami atau menafsirkan informasi.
- (2) Menyoroti tingkat penerimaan atau penolakan terhadap norma dan aturan masyarakat.
- (3) Pematuhan atau penolakan aturan sosial.
- (4) Membahas bagaimana niat individu diubah menjadi tindakan konkret atau mengalami kegagalan.
- (5) Menggambarkan dinamika kekuasaan dan kontrol dalam hubungan sosial.
- (6) Mengeksplorasi ruang gerak individu dalam membuat pilihan dan kendala yang mungkin dihadapi.
- (7) Pengalaman emosional individu.

- (8) Dampak tindakan individu pada kelangsungan atau perubahan struktur sosial.  
(9) dinamika konflik atau konsensus dalam merumuskan aturan sosial.

Dalam melihat bagaimana budaya manipulatif dapat tereproduksi dalam ruang lingkup organisasi, kita bisa imajinasikan dengan kerangka yang dikemukakan oleh Anthony Giddens sebagai proses individu berinteraksi dengan struktur sosial; Pada tahap pertama individu mencoba memahami terkait informasi tentang proses pencairan keuangan untuk keberlangsungan organisasi yang setiap tahun dilakukan oleh pihak universitas kepada organisasi-organisasi intra kampus, sistem dan prosedur yang berlaku adalah Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GU) dalam rangka mengisi kembali uang persediaan organisasi dan sekaligus dalam rangka mengesahkan penggunaan uang persediaan. Tahap penerimaan dan pematuhan, pada tahap ini individu dalam ruang lingkup organisasi intra kampus menerima dan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pihak universitas sebagai penyelenggara kebijakan terkait proses pencairan uang.

Pada tahap pelaksanaan organisasi intra kampus mencoba untuk menerjemahkan maksud dan tujuan aturan yang dibuat oleh pihak universitas agar individu dapat melakukan tindakan yang konkret, tahap pelaksanaan atas kebijakan ini dapat dikatakan gagal karena pihak universitas tidak dapat memahami bagaimana kondisi finansial organisasi internal kampus sehingga membentuk kesadaran kolektif setiap organisasi mahasiswa intra kampus untuk melakukan sebuah tindakan manipulatif dalam proses pencairan keuangan demi berjalannya roda organisasi. Tahap dominasi atau ketergantungan, organisasi mahasiswa intra kampus berusaha untuk memanipulasi bentuk dominasi atau ketergantungan dalam dinamika kekuasaan yang terjadi. Tahapan-tahapan tersebut berusaha untuk memenuhi kesadaran akan kebebasan atau keterbatasan, kebahagiaan atau penderitaan, kelanjutan atau perubahan, serta konflik atau konsensus, dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan manipulatif.

Talcott Parson mengungkapkan bahwa untuk mencapai tujuan tertentu, suatu sistem perlu mengintegrasikan komponen yang saling terkait. Dalam konteks pemahaman tindakan sosial, Parson menjelaskan empat sistem tindakan berikut: Sistem budaya, juga dikenal sebagai sistem simbolik, menganalisis "arti" melalui unsur-unsur seperti kepercayaan, agama, bahasa, dan nilai-nilai, serta konsep sosialisasi yang berperan penting dalam menjaga kontrol sosial dan keutuhan masyarakat. Sistem sosial memandang masyarakat sebagai interaksi berbasis peran, yang selalu menuju keseimbangan. Sistem kepribadian, dengan fokus pada individu sebagai aktor utama, mempelajari kebutuhan, motif, dan sikap. Sistem organisme, yang menjadi dasar manusia secara biologis dan lingkungan fisiknya, mencakup sistem saraf terkait dengan aktivitas motorik dan sistem organ tubuh manusia.

Pierre Bourdieu dalam pemikirannya menjelaskan konsep mengenai (Habitus x Modal) + Ranah = Praktek. Dengan adanya perilaku yang sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan perilaku menyimpang, perilaku melanggar norma dapat disebut dengan korupsi.

Teori sistem dalam sosiologi adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami manusia, interaksi sosial, serta hubungan antara individu dan kelompok. Teori sistem pertama kali dikembangkan oleh Immanuel Wallerstein pada tahun 1970-an dan menjelaskan bahwa dunia adalah sebuah sistem berisi

negara dan wilayah yang saling berinteraksi serta memengaruhi. Teori sistem dalam sosiologi dapat digunakan untuk memahami dinamika organisasi dalam istilah-istilah dari jaringan sosial, hubungan, dan interaksi orang didalam dan diluar organisasi. Dalam konteks organisasi mahasiswa intra kampus, teori sistem dapat membantu dalam memahami perilaku koruptif yang terjadi.

Berikut adalah kaitan teori sistem sosiologi dengan perilaku koruptif dalam ranah organisasi mahasiswa intra kampus:

**Sistem sosial:** teori sistem sosial dapat membantu dalam memahami bagaimana perilaku koruptif dapat terjadi dalam organisasi mahasiswa intra kampus. Sistem sosial memandang masyarakat berada dalam interaksi berdasarkan peran. Dalam organisasi mahasiswa intra kampus, terdapat peran-peran yang harus dijalankan oleh setiap anggota. Tindakan korupsi dapat terjadi ketika anggota suatu organisasi tidak menjalankan perannya dengan baik atau menggunakan perannya untuk keuntungan pribadi.

**Sistem Kepribadian:** Teori sistem kepribadian dapat membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku korupsi pada individu. Kajian teori ini menitikberatkan pada kebutuhan, motif dan sikap. Perilaku korupsi dapat terjadi ketika individu mempunyai kebutuhan atau motif tertentu yang tidak terpenuhi dan memanfaatkan posisinya dalam organisasi untuk memuaskan kebutuhan atau motif tersebut.

**Sistem Organisasi:** Teori Sistem Organisasi dapat membantu memahami faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku korupsi individu. Unit dasar sistem ini adalah manusia dalam arti biologis dan lingkungan fisik tempat ia tinggal, serta sistem saraf yang mengatur perilaku manusia. Perilaku korupsi dapat terjadi ketika individu dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak mendukung integritas dan etika.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa teori sistem dalam sosiologi dapat membantu memahami dinamika organisasi kemahasiswaan di kampus dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku korupsi individu. Memahami dinamika ini dapat membantu dalam pengembangan strategi pencegahan dan penanggulangan korupsi di lingkungan kampus. Kaitan antara teori sistem sosiologi dan perilaku korupsi dalam organisasi mahasiswa intra kampus adalah bahwa teori sistem membantu kita memahami perilaku korupsi sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas.

### **Dampak Budaya Manipulatif**

Persoalan korupsi pada organisasi kemahasiswaan di kampus dapat memberikan dampak yang meresahkan terhadap perilaku korupsi di lingkungan kampus. Dampak ini mencakup kurangnya integritas dan kepercayaan di antara anggota organisasi, sehingga menciptakan kondisi bagi meluasnya praktik korupsi. Selain itu, praktik korupsi dapat menciptakan kesenjangan dan diskriminasi dalam suatu organisasi, merusak stabilitas, dan merusak reputasinya. Hal ini juga dapat menghambat pengembangan karakter, kemampuan kepemimpinan positif siswa dan menimbulkan ketidakpuasan di antara anggota yang tidak terlibat dalam praktik korupsi. Selain itu, juga berdampak pada seluruh lingkungan kampus dengan mengganggu reputasi universitas serta hubungan antara organisasi kemahasiswaan dan universitas.

Korupsi seringkali menciptakan lingkungan di mana integritas dan nilai-

nilai etika diremehkan. Kepercayaan di antara anggota organisasi terkikis dan para pemimpin terlibat dalam praktik korupsi yang sering kali dianggap sebagai contoh yang dapat diterima. Hal ini dapat menyebarkan praktik korupsi sehingga menyebabkan anggota lain tergoda untuk berpartisipasi demi keuntungan pribadi. Dampaknya terhadap organisasi dapat berupa menurunnya semangat dan semangat para anggotanya, kesenjangan, dan keraguan terhadap tujuan dan prinsip organisasi. Selain itu, isu korupsi dapat mengganggu stabilitas organisasi, mengancam keberlanjutan, dan menciptakan ketidakpuasan di antara anggota yang tidak terkait dengan praktik korupsi. Selain merusak reputasi institusi, korupsi juga dapat menjadi hambatan bagi pengembangan karakter dan kepemimpinan mahasiswa yang positif, serta merugikan hubungan organisasi mahasiswa dengan lingkungan kampus.

Dalam situasi ini, anggota organisasi yang terlibat dalam perilaku koruptif mungkin merasa bahwa tindakan tersebut adalah cara yang dapat diterima untuk memenuhi tujuan mereka. Hal ini bisa menciptakan pola perilaku yang menyebar di kalangan anggota dan berkontribusi pada kurangnya kepercayaan dan ketidaksetaraan di dalam organisasi. Selain itu, korupsi dapat merusak reputasi organisasi mahasiswa, merugikan anggotanya dan menyebabkan ketidakstabilan. Dampak-dampak tersebut menciptakan tantangan serius dalam upaya memerangi korupsi dan mempromosikan budaya etika serta integritas di kalangan mahasiswa di lingkungan kampus.

## **KESIMPULAN**

Dari pembahasan artikel ini dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan masih menjadi isu yang menarik untuk dibicarakan. Meskipun pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program anti-korupsi sejak era reformasi, perilaku koruptif tetap muncul, terutama di kalangan pejabat dengan posisi dan jabatan tinggi. Fenomena korupsi ini juga terlihat dalam lingkungan perguruan tinggi, khususnya dalam organisasi mahasiswa. Praktik manipulatif dan perilaku koruptif terjadi dalam upaya mendapatkan dukungan finansial dari pihak dekanat/fakultas. Berbicara tentang dampak serius korupsi dalam organisasi kemahasiswaan. Kesannya tidak hanya terbatas pada kurangnya integritas dan kepercayaan antara anggota organisasi, tetapi juga mencakup kesenjangan, diskriminasi, kerusakan stabilitas, dan merusak reputasi.

Tindakan korupsi dapat menghambat pengembangan karakter dan kemampuan kepemimpinan positif mahasiswa, serta menimbulkan ketidakpuasan di kalangan anggota yang terlibat. Korupsi dapat menciptakan lingkungan di mana integritas dan nilai etika diabaikan, dan pemimpin yang terlibat dalam korupsi dianggap sebagai contoh yang dapat diterima. Hal ini dapat menyebabkan penyebaran praktik korupsi dan mendorong anggota lain untuk ikut serta demi keuntungan pribadi. Upaya untuk memerangi korupsi dan mempromosikan budaya etika serta integritas di kalangan mahasiswa menjadi tantangan serius di lingkungan kampus.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, A. (2017). Pola Korupsi di Perguruan Tinggi Swasta. *AL-IJTIMA' International Journal of Government and Social Science*, 2(2), 161–172.
- Cahyaningtyas, I. R., & Achsin, M. (2018). Studi Fenomenologi Kecurangan Mahasiswa Dalam Pelaporan Pertanggungjawaban Dana Kegiatan Mahasiswa: Sebuah Realita Dan Pengakuan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 53(9).
- Giddens, A. (2010). *Teori Strukturasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Pangesti, M. G. P. R., & Pramudyastuti, O. L. (2023). Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Organisasi Kemahasiswaan : Tinjauan Perspektif Fraud Diamond Theory. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(1), 175–187. <https://doi.org/10.29303/risma.v3i1.452>.
- Dr. Tjipto subadi, M. S. (2009). Sosiologi. *Publikasi ilmiah*, 163. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9300/7.SOSIOL OGI.pdf?sequence=1>
- Putri, dyah ayu eka. (2021). Budaya Anti Korupsi Menurut Perspektif Mahasiswa. Jakarta: *CV Srikandi Kreatif Nusantara*.
- Thoyibbah, I. (2015). Makna kejahatan struktural korupsi dalam perspektif teori strukturasi Anthony Giddens. *Jurnal Filsafat*, 25(1), 134-171.